

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2025



082169456587



<http://kesehatan.payakumbuhkota.go.id>

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tugas,dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	2
	1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	18
	1.4 Permasalahan Utama.....	19
	1.5 Tujuan Penyusunan.....	21
	1.6 Landasan Hukum.....	21
	1.7 Sistematika Penyusunan.....	22
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	23
	2.1 Perencanaan Strategis.....	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
	B. Realisasi Anggaran.....	49
BAB IV	PENUTUP.....	51

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kota Payakumbuh merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2025–2029 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 2 (dua) pernyataan Misi yang diemban, serta 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2025

Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk tahun 2025 dan dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2025 yang tersedia sebesar Rp. 238,588,325,063 termasuk belanja langsung perkantoran.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (Self Assesment), dari 5 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan seluruhnya, 1 (satu) indikator berhasil sesuai target yang ditetapkan, 4 (satu) indikator kinerja belum tercapai 100%. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Kesehatan dan sasaran Pemerintah Daerah

Langkah – langkah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh untuk mengatasi kendala :

1. Melakukan koordinasi dan advokasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat serta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk koordinasi kerja kesehatan secara lebih efisien.
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat serta sosialisasi kegiatan program yang menunjang capaian SPM
3. Memotivasi masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan dan melaksanakan supervisi ke tempat pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggung jawaban. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 29 Januari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH



dr. Yanti, M.P.H

NIP.19691018 200003 2 003

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2025
2. PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025
3. SK IKU OPD TAHUN 2025-2029
4. RENCANA AKSI 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa bupati/walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. Laporan Kinerja ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan juga merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025- 2029, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini berisi ikhtisar pencapaian indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan. Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran strategis disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan diperbandingkan dengan target yang tercantum Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17) dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;

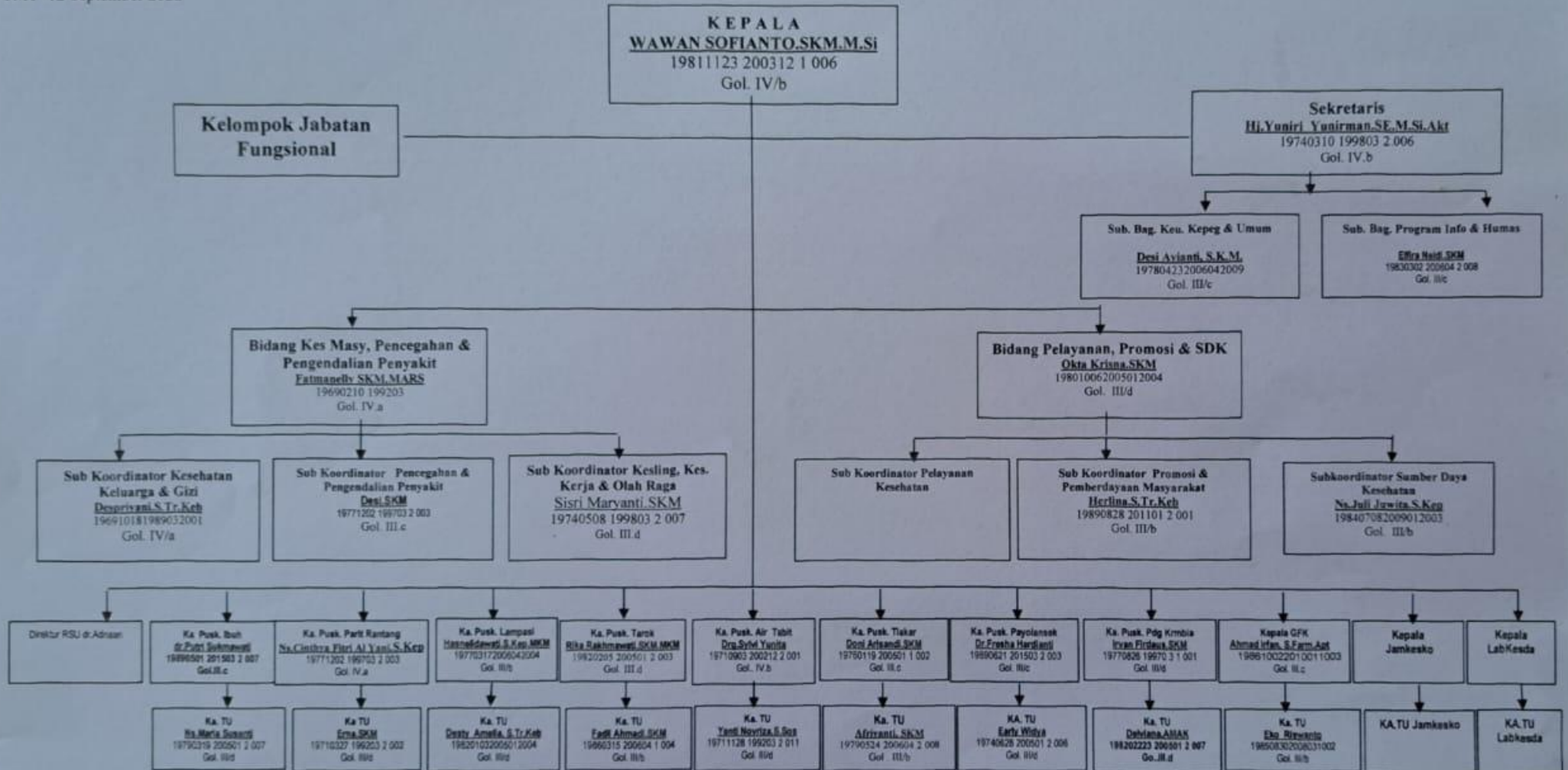
- c. Pengelolaan perijinan di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- f. Pengaturan, pengendalian dan pembinaan terhadap UPT dan Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
- g. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang P3 Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang P2 Sumber Daya Kesehatan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Puskesmas dan Instalasi Farmasi Kota)

STRUKTUR ORGANISAI DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH



1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- b. Menyelenggarakan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- c. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- d. Menyelenggarakan dukungan substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas
- e. Pengguna anggaran dinas
- f. Pengguna barang dinas
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi perumusan kegiatan dinas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;

- e. Melaksanakan koordinasi dan perumusan penyusunan peraturan serta pelaksanaan advokasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara atau daerah;
- g. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
- h. Mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan dan penyusunan peraturan dan pelaksanaan advokasi, pengelolaan urusan umum, keuangan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum, keuangan dan Kepegawaian adalah :

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, serta bahan lain yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Melakukan penyiapan konsep dan tata naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- d. Melakukan penyiapan konsep dan tata naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- e. Melakukan pengadaan kebutuhan peralatan atau perlengkapan kantor;
- f. Melakukan pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- g. Melakukan pemeliharaan dan perawatan ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, sarana dan prasarana kantor dan barang habis pakai;
- h. Melakukan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahan tanggaan lainnya;

- i. Melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut pegawai;
- k. melakukan koordinasi dan melaporkan kehadiran pegawai;
- l. menyusun penerbitan surat keputusan dalam jabatan fungsional dan mengurus urusan kepegawaian pada jabatan tersebut;
- m. mengerjakan fasilitasi usulan pengangkatan, kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan, pemberian sanksi dan atau hukuman, dan pelatihan penjurangan pegawai;
- n. memproses keperluan dan kebutuhan administrasi kepegawaian dalam hal penataan kinerja pegawai serta pengurusan administrasi angka kredit dan pelayanan lainnya;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian umum dan kepegawaian pada atasan;
- p. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan;
- q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r. menyusun dan mengelola keuangan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. mempelajari dan menelaah peraturan tentang keuangan dinas;
- t. menyusun rencana penclapatan dan belanja tidak langsung dinas;
- u. melakukan koorclinir pengadministrasian keuangan dinas terhadap belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal, belanja aparatur dan publik;
- v. melakukan pertanggungjawaban pencairan dana;
- w. melakukan verifikasi anggaran pendapatan belanja dinas;
- x. mengerjakan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;
- y. melakukan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas; melaksanakan pengendalian administrasi barang, aset, dan perlengkapan dinas;
- z. melakukan koordinir dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan dan asset;
- â. melakukan pemantauan, pencatatan barang dan pelaksanaan administrasi aset, barang inventaris, kendaraan dinas, rumah dinas serta menyelenggarakan usulan penghapusan asset;

- ä. menyusun laporan terkait urusan keuangan, penganggaran, dan aset dinas; dan
- ö. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan. Penjabaran tugas Sub Bagian Program adalah :

- a. menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk program dan kegiatan dinas;
- b. melakukan penyusunan program dengan menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melakukan penghimpunan dan fasilitasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. melakukan penghimpunan, menganalisa, dan menyusun laporan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- e. melakukan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- f. melakukan pengelolaan informasi lintas program dan lintas sektor;
- g. menyusun kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data;
- h. melakukan pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat serta hubungan masyarakat;
- i. melakukan rekapitulasi laporan pencapaian program dan kegiatan dinas;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- k. menyusun laporan sub bagian program dan informasi untuk disampaikan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Sub Koordinator/ JFT yang berfungsi sebagai Ketua Tim yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sub Koordinator/ Ketua Tim Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga. Penjabaran tugas Sub Koordinator Kesehatan /Ketua Tim Keluarga dan gizi adalah :

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana;

- b. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana;
- c. melakukan pembinaan tenaga kesehatan penolong persalinan;
- d. melakukan audit maternal dan perinatal;
- e. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga;
- g. melakukan upaya kesehatan sekolah di tingkat sekolah dasar dan sederajat, sekolah menengah pertama dan sederajat, sekolah menengah atas dan sederajat;
- h. melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas, klinik, bidan praktek mandiri (BPM) dan rumah sakit;
- i. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- j. merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan gizi masyarakat serta pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan penanggulangan gizi masyarakat;
- k. melakukan peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- l. melakukan pemantauan status gizi anak balita dan ibu hamil di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaringannya, serta posyandu;
- m. melakukan pemantauan pendistribusian vitamin A kepada balita, ibu nifas dan masalah gizi lainnya;
- n. merancang perencanaan dan melaksanakan pemberian makanan tambahan pada kasus kekurangan energi protein dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil;
- o. melakukan pembinaan pemberian ASI eksklusif dan klinik laktasi; dan
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OlahRaga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan OlahRaga. dipimpin oleh seorang Sub Koordinator/JFT yang berfungsi sebagai Ketua Tim yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sub Koordinator/ Ketua tim Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksana kebijakan penyehatan lingkungan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Penjabaran tugas Sub Koordinator / Ketua Tim Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah:

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar, hygiene, dan sanitasi pangan dan sanitasi tempat tempat umum/tempat pengelolaan makanan;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan kesehatan okupasi dan survailens, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olah raga;
- c. merancang rencana melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. melakukan penyiapan penyusunan bahan kegiatan dan bimbingan teknis serta supervisi kapasitas kerja pekerja dan institusi;
- e. melakukan penyiapan pelaksanan kegiatan dan bimbingan teknis supervisi kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, okupasi dan survailans kapasitas kerja, lingkungan kerja;
- f. melakukan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyehatan air dan sanitasi dasar penyehatan pangan, dan penyehatan udara dan kawasan, serta pengawasan limbah dan radiasi;
- g. melakukan pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi;
- h. melakukan kegiatan kesehatan keolahragaan masyarakat;
- i. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air, Perusahaan Daerah Air Minum, depot air minum isi ulang, dan sumber air lainnya serta air badan air, kolam renang, pemandian umum;
- j. melakukan pembinaan terhadap kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Kader Kesehatan Lingkungan;
- k. melakukan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum dan tempat pengolahan atau penyediaan makanan;
- l. melakukan pengawasan dan pembinaan sanitasi pada lingkungan pemukiman, pembinaan kota sehat dan pengawasan sampah medis;

- m. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program yang menyangkut analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- n. memproses penerbitan rekomendasi laik sehat bagi sarana tempat umum, tempat pengelolaan makanan, dan pestisida;
- o. melakukan pengelolaan laboratorium air pada dinas;
- p. menyusun laporan tahunan kesehatan lingkungan; dan
- q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.3) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Sub Koordinator/ JFT yang berfungsi sebagai Ketua Tim yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Penjabaran tugas Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah:

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian menular langsung, penyakit bersumber binatang dan vektor;
- c. merancang rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular;
- d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pemapasan akut, HIVAIDS,infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- e. merancang rencana kebutuhan obat dan sarana program penyakit menular;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya;

- g. melakukan monitoring dan bimbingan teknis program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjut beserta jejaringnya;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjut beserta jejaringnya;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan narkotika psikotropika zat adiktif;
- j. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- k. melakukan penyiapan bahan Bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- l. melakukan pertemuan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
- m. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- n. melakukan koordinasi dalam pengendalian wabah, bencana, imunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. menyusun laporan program penyakit menular;
- q. melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji dan imunisasi;
- r. melakukan penyiapan, pelaksanaan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji, dan imunisasi;
- s. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji dan imunisasi;

- t. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji, imunisasi;
- u. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah;
- v. merancang rencana kegiatan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana;
- w. melakukan penyelidikan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan penyakit yang berpotensi wabah serta keracunan;
- x. melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon jamaah haji;
- y. melakukan penghimpunan dan menganalisa data surveilans, kejadian luar biasa, wabah dan bencana dari rumah sakit dan puskesmas;
- z. melakukan koordinator penanggulangan kejadian luar biasa;
- å. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- ä. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA;
- ö. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA;
- aa. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang kefarmasian, serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. merumuskan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan di pimpin oleh seorang Sub Koordinator/ JFT yang berfungsi sebagai Ketua Tim yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan . Ketua Tim Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi. Penjabaran tugas Tim Pelayanan Kesehatan adalah :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan
- b. merencanakan program kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan;
- c. melaksanakan program kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan;
- d. membagikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan;
- e. membuat laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.2 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator/JFT yang berfungsi sebagai Ketua Tim yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Penjabaran tugas Sub Koordinator/ ketua Tim Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. melakukan pengelolaan produksi komunikasi publik tentang program kesehatan melalui liputan, pendokumentasian, dan pengolahan bahan publikasi program kesehatan;
- b. memantau, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan penanggulangan gizi masyarakat;
- c. membina dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Polindes, Pos Kesehatan Kelurahan, Pos Pembinaan terpadu, Pos Lanjut Usia, Tanaman Obat keluarga, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren, dan Saka Bhakti Husada; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi Kesehatan masyarakat;

4.3 Seksi Sumber Daya Kesehatan

Seksi Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator/JFT yang berfungsi sebagai Ketua Tim yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Kesehatan. Penjabaran tugas Sub Koordinator /Ketua Tim Sumber Daya Kesehatan adalah :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- b. Perencanaan program kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. UPTD Instalasi Farmasi

UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian. Penjabaran tugas UPTD Instalasi Farmasi adalah:

- a. melakukan perencanaan, pengadaan, pengawasan obat;
- b. melakukan pembinaan manajemen pengelolaan obat di puskesmas dan puskesmas pembantu;
- c. melakukan perencanaan dan pendistribusian obat;
- d. melakukan pemeriksaan, monitoring obat pada puskesmas, puskesmas pembantu, dan pos kesehatan keliling;
- e. melakukan pengelolaan kegiatan laik sehat pangan, Industri Pangan Rumah Tangga dan rekomendasi apotik, toko obat, dan perbekalan kesehatan;
- f. melakukan pengawasan dan registrasi obat, makanan dan minuman produksi rumah tangga, apotik, toko obat;
- g. melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi, penanggung jawab peredaran obat atau sediaan farmasi, napza, kosmetik, obat tradisional di puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, toko obat, dan toko obat tradisional;
- h. melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi, terhadap pengelola toko makanan, minuman, dan sarana produksi industri rumah tangga;
- i. melakukan pengambilan sampel atau contoh sediaan farmasi di lapangan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian untuk disampaikan kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Organisasi Khusus

Unit organisasi khusus Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah RSUD Adnan WD yang memberi pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian. RSUD Adnan WD

dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

1. Jabatan Fungsional

Pada dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

1) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi “Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan Pengembangan Kualitas Pendidikan dan Sentra UMKM yang Kompetitif“

Misi yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah Misi nomor 1 “Mewujudkan SDM yang berkualitas” dan Misi 3 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif”.

Program yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah program prioritas Bidang Kesehatan “Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat, Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan, Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman”.

2) Renstra Kementerian Kesehatan

Visi Kementerian Kesehatan di dalam Renstra kementerian Kesehatan 2025- 2029 merupakan visi Presiden RI yaitu “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang Kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat,

produktif, mandiri dan berkeadilan. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden tersebut, maka telah ditetapkan 8 (Delapan) Misi utama atau Asta Cita Presiden. Guna mewujudkan misi Presiden dalam bidang kesehatan tahun 2025-2029,

Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yakni :

1. Penurunan Angka Stunting , Kematian Ibu dan Kematian Bayi
2. Penguatan pemeriksaan Kesehatan Gratis
3. Pemerataan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan
4. Pengendalian Penyakit dan Kemandirian Kesehatan
5. Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan strategis Kementerian Kesehatan tersebut diatas, ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
3. Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan
4. Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah
5. Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis
6. kesehatan dan uji klinisMeningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Penentuan permasalahan utama berdasarkan isu bidang kesehatan skala nasional, provinsi dan kota, yaitu:

a. Penurunan Persentase Stunting

Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan stunting, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program.

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

b. Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Jumlah kematian ibu melahirkan Kota Payakumbuh masih ada (2 kasus di tahun 2025) dan angka kematian bayi juga masih tinggi (19 kasus di tahun 2025). Peningkatan capaian kesehatan ibu yang tidak disertai dengan perbaikan jumlah kematian ibu, mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal.

c. Penurunan Kasus TB

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus Tuberkulosis terbesar di dunia. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki program penanggulangan Tuberkulosis mencakup tiga hal yaitu meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/AIDS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat; memperkuat sistem informasi TB terpadu (SITT); meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan.

d. Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi bermanfaat terutama bagi anak-anak sebagai metode pencegahan dini dari berbagai risiko kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 Indonesia telah menetapkan target untuk kabupaten/kota bahwa 90% anak berusia 12-23 bulan 80% bayi berusia 0-11 bulan akan memperoleh imunisasi dasar lengkap di tahun 2025. Bagi anak-anak, imunisasi memberi dampak yang lebih signifikan dan merupakan strategi terbaik untuk menurunkan angka kematian anak.

Penyebarluasan informasi tentang imunisasi rutin secara tepat waktu, akurat, dan transparan sangat diperlukan guna meredakan kekhawatiran terhadap berbagai isu terkait imunisasi, serta menggenjot tingkat penerimaan dan pemanfaatan layanan imunisasi rutin oleh masyarakat.

e. Peningkatan Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK). Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan

mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga. Pelaksanaan pendekatan keluarga di Puskesmas, focus pada penyelesaian satu per satu kelurahan di wilayah kerjanya. Setelah satu kelurahan diselesaikan pendataan sampai tahap intervensi kemudian dapat menjadi contoh untuk dimulainya pendataan di kelurahan lainnya sampai selesai intervensi. Pendataan PIS PK untuk kota Payakumbuh belum selesai, ini menjadi permasalahan yang harus ada strategi khusus dan focus dalam penanganannya. Pendataan yang belum selesai menjadi kendala dalam melakukan intervensi yang tepat. Pelaksanaan dengan strategi focus satu persatu tersebut harus menjadi perhatian khusus sehingga nilai IKS di kelurahan selanjutnya diharapkan lebih baik dan optimal

1.5 Tujuan Penyusunan

Penyusunan laporan kinerja/ LKjIP Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai umpan balik peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, meningkatkan perencanaan bidang kesehatan, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja.

1.6 Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025- 2029.

1.7 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- 1.5 Tujuan Penyusunan
- 1.6 Dasar Hukum
- 1.7 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2 Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IVPENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Langkah Perbaikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

1.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana

Strategis Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Renja OPD, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh sebagai Kota "Payakumbuh maju bermartabat melalui pemberdayaan, pengembangan kualitas pendidikan, dan sentra umkm yang kompetitif".

Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah : "Payakumbuh maju bermartabat melalui pemberdayaan, pengembangan kualitas pendidikan, dan sentra umkm yang kompetitif".

Penjelasan pernyataan Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2025-2029 yaitu:

- a) Penyehatan masyarakat yang utama adalah untuk Masyarakat Kota Payakumbuh untuk hidup dalam Lingkungan yang sehat, meliputi lingkungan tempat tinggal, rumah, sekolah, pasar, tempat ibadah dan sarana-sarana umum lainnya.
- b) Masyarakat hidup dengan pola perilaku sehat dalam 8 tatanan kesehatan yang sesuai dengan Gaya Hidup Sehat ber-PHBS yakni tatanan rumah tangga, tatanan perkantoran, tatanan tempat ibadah, tatanan tempat usaha (home industri), tatanan pasar, tatanan sekolah (pendidikan), tatanan pariwisata, tatanan restoran /tempat makan.
- c) Dukungan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam artian dukungan dari SDM kesehatan yang profesional, sarana kesehatan yang mencukupi, pembiayaan kesehatan yang memadai dan mutu pelayanan kesehatan yang semakin baik.

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan SDM yang berkualitas
- b) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istanis Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

1) Tujuan

Terwujudnya profesionalisme dan komitmen Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dalam program dan kerja sama lintas sektoral, menggalang kemitraan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat yang dinamis, terbinanya perilaku hidup sehat untuk tercapainya Payakumbuh Sehat.

Secara teknis, tujuan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah :

**“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**

2) Sasaran sebagai hasil kinerja terukur yang diharapkan dalam pelaksanaan rencana strategis ini dijabarkan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat
- Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

3) Strategi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2025- 2029 sebagai berikut

- a. Peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan lanjut
- b. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan
- c. Pemerataan akses layanan kesehatan melalui peningkatan layanan primer dan lanjutan.
- d. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui skrining serta pemeriksaan Kesehatan gratis
- e. Penanggulangan permasalahan gizi masyarakat dan penuntasan masalah stunting
- f. Pengoptimalan sistem pengawasan obat dan makanan pada apotik dan PIRT
- g. Pengoptimalan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui kampanye gaya hidup sehat pada masyarakat
- h. Pengoptimalan layanan publik masyarakat

4) Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas dan RSUD Dr Adnaan WD sesuai standar dan prioritas ILP serta KJSU
- b. Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan Puskesmas dan RSUD Dr Adnaan WD terakreditasi paripurna
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan SIKN
- d. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas serta tenaga medis dan kesehatan sesuai standar di RSUD Dr Adnaan WD
- e. Peningkatan kompetensi tenaga medis dan kesehatan sesuai standar akreditasi Puskesmas dan RSUD Dr Adnaan WD
- f. Pendistribusian tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan Puskesmas dan RSUD Dr Adnaan WD dalam pemenuhan standar minimum pelayanan.
- g. Peningkatan metoda pendekatan pelayanan KIA & KB di Pustu ILP, Puskesmas dan RSUD Dr adnaan WD
- h. Peningkatan pola hidup sehat sebagai tren gaya hidup pada tingkat rumah tangga
- i. Peningkatan penerapan 5 pilar STBM pada rumah tangga dan kelurahan
- j. Deteksi dini terhadap penyakit menular dan tidak menular melalui skrining dan Pemeriksaan Kesehatan gratis
- k. Pengembangan kemitraan dengan organisasi non pemerintah dan swasta dalam mendukung kampanye imunisasi
- l. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan Kesehatan
- m. Dukungan Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak Balita
- n. Peningkatan pengawasan izin apotik dan PIRT serta pembinaan yang terstandar
- o. Penguatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program Kesehatan
- p. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- q. Pengoptimalan layanan publik Masyarakat

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Harapan Hidup (tahun)	75.08	75.31	75.57	75.83	76.18	76.36	76.62	IKD
2			Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	16,40	13,70	12,45	11,20	9,95	8,70	7,45	IKD
3		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (indeks)	0.35	0.38	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	IKU
4		Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi stunting berdasarkan-PPGM	2.16	2.12	2.08	2.04	2	1.94	1,9	IKU
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	83	85	87	88	89	90	91	IKU

1. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh No: 800.1.5/54/DKK/2029 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025- 2029

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 adalah seperti yang bagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						Ket
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Harapan Hidup (tahun)	75.08	75.31	75.57	75.83	76.18	76.36	76.62	IKD
	Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	16,40	13,70	12,45	11,20	9,95	8,70	7,45	IKD
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (indeks)	0.35	0.38	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	IKU
Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi stunting berdasarkan-PPGM	2.16	2.12	2.08	2.04	2	1.94	1,9	IKU
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	83	85	87	88	89	90	91	IKU

Tabel 2.
Penjelasan Indikator
Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULA /CARA PENDUKUNG	SUMBER DATA
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Usia harapan Hidup	Angka		Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	BPS
2		Prevalensi Stunting	%	Stunting adalah kondisi anak memiliki berat badan dibawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan gizi kronis pasca periode 1000 hari pertama kehidupan	Jumlah anak balita stunting dibawah 5 tahun dibagi jumlah anak balita dikali 100 persen $JAB(5) \text{ SP Stunting PAB}(5) : \quad \times 100\%$ $SP \text{ Stunting } JAB(5)$ $PAB(5) \text{ SP Stunting} = \text{Prevalensi Anak Balita yang menderita Sangat Pendek (stunting)}$ $JAB(5) \text{ SP Stunting} = \text{Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu}$ $JAB(5) = \text{Jumlah anak balita pada waktu yang sama}$	SSGI
3	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Tahun	Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni: *Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, *Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 ≤ 0,8	Perhitungan 12 indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang terdiri dari : 1. Keluarga mengikuti KB 2. Ibu bersalin di Fasyankes	Permenkes No. 39 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PISPK

				<p>dan *Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan 5. Memantau pertumbuhan balita setiap bulan 6. Penderita TB paru berobat sesuai standar 7. Penderita hipertensi berobat secara teratur 8. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan 9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok 10. Keluarga mempunyai akses air bersih 11. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat Sekeluarga menjadi anggota JKN 	
4.	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting	%	<p>Stunting adalah kondisi anak memiliki berat badan dibawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan gizi kronis pasca periode 1000 hari pertama</p>	<p>Jumlah anak balita stunting dibawah 5 tahun dibagi jumlah anak balita dikali 100 persen JAB(5) SP Stunting $PAB(5) : \frac{\text{JAB}(5)}{\text{JAB}(5)} \times 100\%$ SP Stunting JAB(5)</p> <p>PAB(5) SP Stunting = Prevalensi Anak Balita yang menderita Sangat Pendek (stunting)</p> <p>JAB(5) SP Stunting = Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p>	ePPGBM

5.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada periode waktu tertentu	Target pemerintah Kota Payakumbuh untuk peningkatan capaian kinerja perangkat daerah	Inspektorat
----	---	--	--	--	-------------

2. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.31
		Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	%	13.70
2	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks keluarga sehat	Tahun	0.38
3	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi stunting berdasarkan e-PPGM	%	2.12
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	85

Tabel 2.4
Program Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2025

Program	Anggaran		Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp	181.744.376.980	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Rp	54.542.700.883	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	Rp	511.696.900	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp	514.182.600	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	1.275.367.700	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan ditunjang dengan adanya 5 Program dan anggaran sebesar Rp.238.588.325.063,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Permenpan nomor 88 thn 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh No: 800.1.5/54 /DKK/2025

tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target 2025 Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	75,31	75,54	100,31
		Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	%	13,70	16,4	80,29
2	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Tahun	0,38	0,6	176,47
3	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi balita Stunting	%	2,12	2,59	77,83
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	83,7	98,47

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025		Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2023	
			Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Usia Harapan Hidup	75,54	100,31	75,08	99,69	74,43	99,20
		Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	16,4	80,29	16,4	80,29	19,8	79,7
2.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,6	176,47	0,35	70	0,34	85
3	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan masyarakat	Prevalensi balita Stunting	2,59	77,83	2,08	162,18	2,17	160,69
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,7	98,47	80,5	96,99	A	A

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Renstra 2025	% Capaian		
			2025	2024	2023		2025	2024	2023
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Usia Harapan Hidup	75,54	75,08	74,43	75.31	100,31	99,69	99,20
		Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	16,4	16,4	19,8	13,70	80,29	80,29	79,7
2.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,6	0,35	0,34	0,38	176,47	70	85
3	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi balita Stunting	2,59	2,08	2,17	2,12	77,83	162,18	160,69
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,7	80,5	A	85	98,47	96,99	A

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Usia Harapan Hidup	75,31	74,63	74,77
		Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	16,4	20,5	18,8
2	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,6	Belum ada data	Belum ada data
3	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi balita Stunting	2,59	Tidak tersedia	Tidak tersdia
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,7		

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan indikator kinerja

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas layanan Kesehatan masyarakat

a. Fasilitas fisik

Fasilitas pelayanan yang mudah diakses masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar ,bersih dan memadai sehingga kepuasan pasien meningkat

b. Digitalisasi Kesehatan

Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi dan kualitas layanan dimana masing masing puskesmas sudah memiliki SIMPUS melalui aplikasi RME

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pelatihan dan pembinaan melalui Peningkatan Kompetensi ,keahlian dan penegtahuan tenaga kesehatan yang ada

- d. Pemberian motivasi, imbalan yang layak, promosi, serta lingkungan kerja yang mendukung bagi tenaga kesehatan yang ada di masing masing Fasilitas kesehatan
- e. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Mutu Nasional
- f. Kebijakan dan Regulasi yang mendukung mutu pelayanan publik
- g. UHC untuk Jaminan Kesehatan bagiseluruh masyarakat
- h. Manajemen Kinerja yang terukur melalui Evaluasi kinerja yang Terstruktur dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi area perbaikan layanan
- i. Tenaga Kesehatan yang responsif cepat terhadap keluhan pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan
- j. Dukungan yang kuat dari lintas sektor
- k. Status Puskesmas dan rumah sakit di Kota Payakumbuh yang telah terakreditasi yang menunjukkan pelayanan kesehatan di Kota Payakumbuh mulai dari puskesmas sampai rumah sakit sudah sesuai standard. Pada tahun 2025 status akreditasi 8 Puskesmas yang ada di Kota Payakumbuh rincinnya adalah 7 Puskesmas akreditasi paripurna, 1 Puskesmas akreditasi utama. Untuk RS pada tahun 2025 status akreditasi paripurna sebanyak 4 RS.

Tabel 3.1
Status Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Nama Puskesmas	Akreditasi	Nama Rumah Sakit	Akreditasi
1	Lampasi	Paripurna	RSUD Adnan WD	Paripurna
2	Payolansek	Paripurna	RSU Yarsi	Paripurna
3	Tarok	Paripurna	RSIA Anisa	Paripurna
4	Parik Rantang	Paripurna	RSIA Sukma Bunda	Paripurna
5	Air Tabit	Paripurna		
6	Tiakar	Paripurna		
7	Ibuh	Paripurna		
8	Padang Karambia	Utama		

b) Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja indikator

Sasaran Strategis :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal
2. Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

a) Kuantitas dan Distribusi

Jumlah sumber daya manusia kesehatan terutama di Puskesmas belum mencukupi dan tidak merata di seluruh Puskesmas

b) Kualitas dan Pelatihan

Masih ada tenaga kesehatan yang kualitas ketrampilan belum memadai untuk menangani kebutuhan masyarakat saat ini

c) Motivasi dan Kinerja Beban kerja yang tinggi dan kesenjangan dalam imbalan mempengaruhi motivasi kerjayang berujung menurunnya mutu layanan

d) Penganggaran kurang optimal

Pendanaan yang kurang efisien di faskes primer menghambat optimalisasi program terutama kegiatan promotif dan preventif

e) Sarana dan Prasarana

Masih ada faskes yang fasilitas nya belum sesuai standar akreditasi

f) Literasi Kesehatan Rendah

Masyarakat kurang memahami informasi kesehatan yang di beri petugas sehingga kepatuhan terhadap PHBS masih rendah.

g) Kurangnya Kesadaran

Tingkat Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kebersihan ,pola hidup sehat dan kesehatan perorangan

h) Faktor Kesehatan Masyarakat dan Penyakit

tidak tercapainya target UHH biasanya disebabkan oleh tingginya angka kematian pada kelompok usia rentan serta rendahnya kualitas hidup pada usia lanjut.

i) Akses Air Bersih dan Sanitasi

Kurangnya akses terhadap air layak minum dan sanitasi yang

buruk meningkatkan risiko penyakit diare dan *stunting*, yang berdampak pada ketahanan fisik jangka panjang.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Tahun 2025 jumlah tenaga fungsional kesehatan yang ada di Puskesmas, RSUD dr. Adnan WD dan Dinas Kesehatan adalah 987 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tenaga Fungsional Kesehatan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD
Kota Payakumbuh Tahun 2025

NO	RUMPUN SDK	DINAS KESEHATAN		PUSKESMAS		RUMAH SAKIT		SARANA KEFARMASIAN DAN ALKES		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	TENAGA KESEHATAN										
a	Medis			3	28	16	35			19	63
b	Perekam Medis			1	15	8	9			9	24
c	Pranata Labor			3	12	4	13			7	25
d	Terapis Gigi dan Mulut			1	14	1	5			2	19
e	Keperawatan			2	54	53	154			55	208
f	Kebidanan	0	1	0	115		39			0	155
g	Kefarmasian	0	1	1	19	6	30	1	3	8	53
h	Kesehatan Masyarakat	0	22	1	8					1	30
i	Kesehatan Lingkungan	0	4	4	7		2			4	13
j	Gizi				12		7			0	19
k	Keterapian Medik					2	3			2	3
l	Keteknisian Medis					1	1			1	1
m	Teknik Biomedika									0	0
n	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	0	3	2	12	1	1			3	16
o	Perencana	1	2				1			1	3
p	Arsiparis	0	1							0	1
q	Epidemiolog				1		1			0	2
2	ASISTEN TENAGA KESEHATAN									0	0
3	TENAGA PENUNJANG	4	24	16	22	74	96	4	0	98	142
	Total	5	58	34	319	166	397	5	3	210	777
	TOTAL L+P	63		353		563		8		987	

Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan 2025

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kurang maka tenaga kesehatan yang ada dimaksimalkan dalam pekerjaannya, misalnya dokter/nutrisi/sanitarian membantu tugas promosi kesehatan dan ilmu perilaku, perawat/bidan membantu tugas pembimbing kesehatan kerja/pembina wilayah kerja

b. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh memiliki 8 Puskesmas. Dan 2 di antaranya adalah Puskesmas Mampu PONEB pada tahun 2025 semua Puskesmas di Kota Payakumbuh statusnya telah terakreditasi dan alat kesehatan yang ada mendukung pelayanan kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat. sudah terstandar

c. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Usia Harapan Hidup	75,31	75,54	100,31	IKD		
		Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	13,70	16,4	80,29			
2.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,38	0,61	176,47	56,843,948,083	52,021,384,040	91.52
3	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi balita Stunting	2,12	2,59	77,83			

4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	83,7	98,47	181,744,376,980	168,766,838,032	92.86
---	--	--	----	------	-------	-----------------	-----------------	-------

Tabel 3.4
Pencapaian Target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
A.	Misi 1, Mewujudkan SDM yang berkualitas	4	2	25.00%	-	0.00%	2	75.00%
B.	Misi 3, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif	1	-	0.00%	-	0.00%	1	100.00%
	Total	5	2	40.00%	-	0.00%	3	60.00%

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN		
1	Melebihi / Melampaui Target	40.00%	2	Ind
2	Sesuai Target	0.00%	-	Ind
3	Tidak Mencapai Target	60.00%	3	Ind

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A	Misi 1	4	
1	Melebihi / Melampaui Target	2	50.00%
2	Sesuai Target	-	0.00%
3	Tidak Mencapai Target	2	50.00%
B	Misi 2	1	
1	Melebihi / Melampaui Target	-	0.00%

2	Sesuai Target	-	0.00%
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00%

Tabel 3.7
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1	4		168,766,838,032	92,86
1	Melebihi/Melampaui Target	2	50 %		
2	Sesuai Target	0	0 %		
3	Tidak mencapai target	2	50%		
B.	Misi 3	1		52,021,383,190	91,52
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0 %		
2	Sesuai Target	0	0 %		
3	Tidak mencapai target	1	100%		

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja

Pada tahun 2025 realisasi fisik semua program Dinas Kesehatan adalah 95,58% dari target 100% sedangkan realisasi fisik program pendukung PK sebagai berikut :

Tabel 3.1.7.1
Realisasi Fisik Program Pendukung PK Tahun 2025

No.	Program	Fisik (%)		
		Target	Realisasi	Deviasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100	99	1

2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	100	92	8
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	100	87	13
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	100	100	0
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	97	3

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 jumlah total anggaran Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebesar Rp.238.588.325.063,- dengan realisasi anggaran Rp220.788.221.222(92,54%) sedangkan realisasi anggaran pendukung PK tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Pendukung PK Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp.)		
			Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Program pemenuhan UKP dan UKM	53.270.952.883,-	48.934.656.641,-	91,86
2		Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	511,696,900,-	389,974,269,-	76,21
3		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	514,182,600,-	514,182,600,-	100
4		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1,275,367,700	1,236,104,823	96,92

5	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Program pemenuhan UKP dan UKM	1.271.748.000	1.009.398.646	79,37
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	181.744.376.980	168.766.838.032	92,86

Total realisasi anggaran PK masih dibawah 100%. Hal ini karena :

1. Beberapa subkegiatan tidak dicairkan anggarannya di karenakan kegiatan berada di DPA perubahan.
2. Target sasaran dari kementrian tinggi dari sasaran yang mau di scrining.
3. Pemeriksaan spesimen penyakit potensial KLB tidak banyak kasus yang di temukan pada tahun 2025.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan capaian 5 indikator kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh selama satu tahun anggaran 2025. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat kota Payakumbuh dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dan aturan yang berlaku. Hal ini juga didukung dengan adanya kerjasama lintas sektor terkait, stakeholder yang kompeten dan dukungan tokoh masyarakat serta dengan memaksimalkan pemanfaatan media komunikasi dan media daring yang ada.

Pada tahun 2025 realisasi program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh belum maksimal, karena dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih ada 3 indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Angka Harapan hidup, Prevalensi Stunting (SSGI), Prevalensi Stunting (E-PPGBM), AKIP. Untuk realisasi anggaran pada tahun 2025 anggaran pendukung PK yang terealisasi 92,55%.

B. Langkah Perbaikan

Berdasarkan kesimpulan diatas, langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Tetap memanfaatkan media cetak/daring yang ada dalam melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat, lintas sektor terkait, *stakeholder* yang kompeten dan tokoh masyarakat terkait program kesehatan terutama untuk pencapaian indikator kinerja yang belum mencapai target.
2. Tetap menjalin kerja sama lintas program dan lintas sektor terutama jaring dan jejaring layanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti klinik dan bidan praktek mandiri (TPMD/TPMB)
3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan melalui workshop/pelatihan maupun dengan pendampingan oleh tenaga ahli, seperti Spesialis Kebidanan dan Spesialis Anak ke Puskesmas

4. Melengkapi sarana dan prasarana yang terstandar dan masih diperlukan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
5. Pembinaan terpadu lintas program dan berkesinambungan terhadap pelayanan kesehatan, sarana dan prasana penunjang pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Kota Payakumbuh dengan melibatkan lintas sektor terkait, seperti DPMTSP, BPOM dan Dinas Perdagangan.
6. Penguatan Surveilans dan Kualitas Data: Melakukan validasi data pada tingkat desa/kelurahan untuk memastikan tidak ada penduduk berisiko yang terlewatkan (terutama balita untuk *stunting* dan lansia untuk UHH).
7. Akselerasi Skrining PTM: Memperluas jangkauan deteksi dini penyakit tidak menular (seperti hipertensi dan diabetes) di tingkat Puskesmas atau Posyandu Prima guna mencegah kematian dini.
8. Transformasi Layanan Primer: Standarisasi laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) untuk memperkuat fungsi diagnostik dan surveilans penyakit menular (TBC, Hepatitis) yang membebani angka UHH.
9. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal: Untuk *stunting*, fokus pada pemberian protein hewani bagi kelompok berisiko (ibu hamil KEK dan balita gizi kurang) berbasis bahan pangan lokal.
10. Sanitasi dan Air Bersih: Memastikan akses air minum layak dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) untuk mencegah penyakit infeksi berulang yang memicu *stunting*.
11. Surveilans Kualitas Udara: Melakukan monitoring parameter polusi () di area pemukiman untuk menekan risiko penyakit pernapasan kronis yang memperpendek usia harapan hidup.
12. Ketahanan Pangan: Kolaborasi lintas sektor untuk menjamin ketersediaan pangan bergizi dengan harga terjangkau di wilayah dengan prevalensi *stunting* tinggi.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	75.31	75.54	100,31
		Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	13,70	16.4	80.29
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (indeks)	0.38	0.61	160.53
3	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi stunting berdasarkan e-PPGM	2.12	2.59	77.83
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat	85	83.7	98.47

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2025
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025

Rp. 238,588,325,063
Rp. 220,788,221,222 (92.54%)

Payakumbuh, Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh



dr. Yanti, M.P.H
196910182000032003

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (tahun)	75.57
2			Prevalensi Stunting (Pendek & sangat pendek) Pada Balita	12.45
3		Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (indeks)	0,4
4		Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi stunting Berdasarkan e-PPGM	2.08
5		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	87

Payakumbuh, Desember 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH



dr.Yanti, M.P.H
NIP. 196910182000032003

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

KOTA : PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indek Keluarga Sehat dan Prevalensi stunting Berdasarkan e-PPGM	0.38 dan 2.12	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 54,542,700,883,-	Rp. 49,944,054,437,-	91.57 %
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 511,696,900,-	Rp. 389,974,269,-	76.21 %
				Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 514,182,600,-	Rp. 451,249,661,-	86.33 %
				Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1,275,367,700,-	Rp. 1,236,104,823,-	96.92 %
2	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai evaluasi AKIP	85	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 181,744,376,980,-	Rp. 168,766,838,032,-	92.86%

kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	oleh Inspektorat						
				Jumlah	Rp. 238,588,325,063,-	Rp. 220,788,221,222,-	92.54 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp. 238,588,325,063,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp 220,788,221,222,- (92.54 %)

Payakumbuh, Januari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH



dr.Yanti, M.P.H
NIP. 196910182000032003

**RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DINAS KESEHATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	USIA HARAPAN HIDUP							
2		PREVALENSI STUNTING (PENDEK & SANGAT PENDEK) PADA BALITA							
3	MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	INDEK KELUARGA SEHAT	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :0,4						
4	MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	PREVALENSI STUNTING BERDASARKAN E-PPGBM	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :2,08						
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PREVALENSI STUNTING BERDASARKAN E-PPGBM			2,08	
					JUMLAH KEMATIAN IBU			2 jiwa	
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	
					Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	TW 1 : - TW 2 : 1 unit TW 3 : - TW 4 :-		TW 1 : 1.903.373.000,00 □ TW 2 : TW 3 : TW 4 :
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	TW 1 : - TW 2 : 1 unit TW 3 : - TW 4 :-		TW 1 : 3.224.900,00 TW 2 : 240.933.400,00 □ TW 3 : TW 4 :
					Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	TW 1 : 2 unit TW 2 : - TW 3 : - TW 4 :-		TW 1 : 687.124.800,00 TW 2 : □ TW 3 : TW 4 :
					Pengadaan Obat, Nahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	TW 1 : - TW 2 : 1 paket TW 3 : 1 paket TW 4 :-		TW 1 : 691.829.070,00 TW 2 : 786.206.182,00 □ TW 3 : 691.829.070,00 TW 4 :-
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesihatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	TW 1 : 50 keluarga TW 2 : 50 keluarga TW 3 : 50 keluarga TW 4 : 50 keluarga		TW 1 : 10.107.300,00 TW 2 : 7.876.500,00 □ TW 3 : 5.876.500,00 TW 4 :-
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	TW 1 : - TW 2 : 1 unit TW 3 : - TW 4 :-		TW 1 : TW 2 : 114.955.000,00 □ TW 3 : TW 4 :
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	TW 1 : - TW 2 : 1 paket TW 3 : 1 paket TW 4 :-		TW 1 : 12.960.000,00 TW 2 : 23.203.000,00 □ TW 3 : 12.960.000,00 TW 4 : 12.960.000,00
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna		100%	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 488 orang TW 2 : 488 orang TW 3 : 488 orang TW 4 : 488 orang		TW 1 : 9.130.000,00 TW 2 : 20.086.400,00 □ TW 3 : 13.965.400,00 TW 4 : 1.050.000,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tiakar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 21 orang TW 2 : 21 orang TW 3 : 21 orang TW 4 : 21 orang		TW 1 : 7.044.000,00 TW 2 : 9.784.000,00 □ TW 3 : 2.740.000,00 TW 4 :-

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Payolansck	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 22 orang TW 2 : 22 orang TW 3 : 22 orang TW 4 : 22 orang	TW 1 : 3.655.000,00 TW 2 : 9.503.000,00 TW 3 : 6.579.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Ibh	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 22 orang TW 2 : 22 orang TW 3 : 22 orang TW 4 : 22 orang	TW 1 : 5.624.000,00 TW 2 : 5.624.000,00 TW 3 : 5.624.000,00 TW 4 : 5.624.000,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Air Tabit	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 45 orang TW 2 : 45 orang TW 3 : 45 orang TW 4 : 45 orang	TW 1 : 5.280.000,00 TW 2 : 5.280.000,00 TW 3 : 5.103.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Parit Rantang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 160 orang TW 2 : 160 orang TW 3 : 160 orang TW 4 : 160 orang	TW 1 : 2.600.000,00 TW 2 : 6.500.000,00 TW 3 : 7.187.500,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tarok	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 102 orang TW 2 : 102 orang TW 3 : 102 orang TW 4 : 102 orang	TW 1 : 2.262.000,00 TW 2 : 15.732.000,00 TW 3 : 3.540.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Lampasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 20 orang TW 2 : 20 orang TW 3 : 20 orang TW 4 : 20 orang	TW 1 : - TW 2 : 9.868.500,00 TW 3 : 9.868.500,00 TW 4 : 6.579.000,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Padang Karambia	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 67 orang TW 2 : 67 orang TW 3 : 67 orang TW 4 : 67 orang	TW 1 : - TW 2 : 8.555.000,00 TW 3 : 6.845.000,00 TW 4 : 6.845.000,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 473 orang TW 2 : 471 orang TW 3 : 471 orang TW 4 : 471 orang	TW 1 : 5.071.200,00 TW 2 : 1.653.750,00 TW 3 : 28.506.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 470 orang TW 2 : 470 orang TW 3 : 470 orang TW 4 : 470 orang	TW 1 : 109.416.150,00 TW 2 : 77.754.050,00 TW 3 : 107.830.750,00 TW 4 : 75.415.750,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 2079 orang TW 2 : 2079 orang TW 3 : 2079 orang TW 4 : 2079 orang	TW 1 : 2.366.645,00 TW 2 : 36.664.550,00 TW 3 : 1.815.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 5713 orang TW 2 : 5713 orang TW 3 : 5713 orang TW 4 : 5713 orang	TW 1 : 2.012.500,00 TW 2 : 2.012.500,00 TW 3 : 13.971.700,00 TW 4 : 1.050.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Tiakar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 1334 orang TW 2 : 1334 orang TW 3 : 1334 orang TW 4 : 1334 orang	TW 1 : 10.200.000,00 TW 2 : 2.210.000,00 TW 3 : 8.840.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Payolansck	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 813 orang TW 2 : 813 orang TW 3 : 813 orang TW 4 : 813 orang	TW 1 : 3.060.000,00 TW 2 : 3.060.000,00 TW 3 : 11.390.000,00 TW 4 : 10.030.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Ibh	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 1500 orang TW 2 : 1500 orang TW 3 : 1500 orang TW 4 : 1500 orang	TW 1 : 5.312.500,00 TW 2 : 5.312.500,00 TW 3 : 5.312.500,00 TW 4 : 5.312.500,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Air Tabit	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 767 orang TW 2 : 767 orang TW 3 : 767 orang TW 4 : 767 orang	TW 1 : 10.625.000,00 TW 2 : 10.625.000,00 TW 3 : 10.455.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Parit Rantang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 770 orang TW 2 : 770 orang TW 3 : 770 orang TW 4 : 770 orang	TW 1 : 10.000.000,00 TW 2 : 10.000.000,00 TW 3 : 7.455.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Tarok	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 1027 orang TW 2 : 1027 orang TW 3 : 1027 orang TW 4 : 1027 orang	TW 1 : 8.065.000,00 TW 2 : 5.200.000,00 TW 3 : 7.800.000,00 TW 4 : 5.200.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Lampasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 1384 orang TW 2 : 1384 orang TW 3 : 1384 orang TW 4 : 1384 orang	TW 1 : 8.160.000,00 TW 2 : 5.780.000,00 TW 3 : 10.880.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Padang Karambia	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 692 orang TW 2 : 692 orang TW 3 : 692 orang TW 4 : 692 orang	TW 1 : 2.380.000,00 TW 2 : 4.420.000,00 TW 3 : 13.600.000,00 TW 4 : 3.400.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 21.693 orang TW 2 : 21.693 orang TW 3 : 21.693 orang TW 4 : 21.693 orang	TW 1 : 369.900,00 TW 2 : 17.890.000,00 TW 3 : 12.740.000,00 TW 4 : 1.700.000,00	
					Pengelolaan Pelayanan kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 4531 orang TW 2 : 4531 orang TW 3 : 4531 orang TW 4 : 4531 orang	TW 1 : 3.536.700,00 TW 2 : 101.591.950,00 TW 3 : 1.210.000,00 TW 4 : 1.050.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 3471 orang TW 2 : 3471 orang TW 3 : 3471 orang TW 4 : 3471 orang	TW 1 : 1.540.000,00 TW 2 : 14.475.000,00 TW 3 : 2.040.000,00 TW 4 : 2.040.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 490 orang TW 2 : 490 orang TW 3 : 490 orang TW 4 : 490 orang	TW 1 : 1.526.000,00 TW 2 : 6.065.000,00 TW 3 : 2.040.000,00 TW 4 : 1.140.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 84 orang TW 2 : 84 orang TW 3 : 84 orang TW 4 : 84 orang	TW 1 : 2.125.000,00 TW 2 : 16.212.500,00 TW 3 : 3.885.000,00 TW 4 : 3.175.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat ibu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 37 orang TW 2 : 37 orang TW 3 : 37 orang TW 4 : 37 orang	TW 1 : 765.000,00 TW 2 : 765.000,00 TW 3 : 765.000,00 TW 4 : 765.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat parit rantang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 8 orang TW 2 : 8 orang TW 3 : 8 orang TW 4 : 8 orang	TW 1 : 1.590.000,00 TW 2 : 1.500.000,00 TW 3 : 2.000.000,00 TW 4 : 1.800.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat payolasek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 4 orang TW 2 : 4 orang TW 3 : 4 orang TW 4 : 4 orang	TW 1 : 4.590.000,00 TW 2 : 4.590.000,00 TW 3 : TW 4 :	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tiakar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 11 orang TW 2 : 11 orang TW 3 : 11 orang TW 4 : 11 orang	TW 1 : 1.700.000,00 TW 2 : 1.700.000,00 TW 3 : 1.700.000,00 TW 4 : 1.700.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat air tabit	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 10 orang TW 2 : 10 orang TW 3 : 10 orang TW 4 : 10 orang	TW 1 : 3.570.000,00 TW 2 : 3.570.000,00 TW 3 : 3.740.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tarok	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 12 orang TW 2 : 12 orang TW 3 : 12 orang TW 4 : 12 orang	TW 1 : 2.992.000,00 TW 2 : 4.488.000,00 TW 3 : 4.488.000,00 TW 4 : 2.992.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat lampasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 5 orang TW 2 : 5 orang TW 3 : 5 orang TW 4 : 5 orang	TW 1 : 8.840.000,00 TW 2 : 8.840.000,00 TW 3 : 8.840.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat padang karambia	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 8 orang TW 2 : 8 orang TW 3 : 8 orang TW 4 : 8 orang	TW 1 : 2.550.000,00 TW 2 : 2.550.000,00 TW 3 : 2.550.000,00 TW 4 :-	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 757 orang TW 2 : 757 orang TW 3 : 757 orang TW 4 : 757 orang	TW 1 : 1.163.182.000,00 TW 2 : 90.789.000,00 TW 3 : 68.244.000,00 TW 4 : 51.054.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Tiakar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 752 orang TW 2 : 752 orang TW 3 : 752 orang TW 4 : 752 orang	TW 1 : 8.925.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Payolasek	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 6 orang TW 2 : 2.890.000,00 TW 3 : 6 orang TW 4 : 6 orang	TW 1 : 2.040.000,00 TW 2 : 2.890.000,00 TW 3 : 3.230.000,00 TW 4 : 2.210.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Ibut	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 60 orang TW 2 : 60 orang TW 3 : 60 orang TW 4 : 60 orang	TW 1 : 1.615.000,00 TW 2 : 1.615.000,00 TW 3 : 1.615.000,00 TW 4 : 1.615.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Air Tabit	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 26 orang TW 2 : 24 orang TW 3 : 24 orang TW 4 : 24 orang	TW 1 : 1.700.000,00 TW 2 : 1.700.000,00 TW 3 : 850.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Parit Rantang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 41 orang TW 2 : 41 orang TW 3 : 41 orang TW 4 : 41 orang	TW 1 : 1.000.000,00 TW 2 : 1.000.000,00 TW 3 : 1.000.000,00 TW 4 : 315.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Tarok	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 6 orang TW 2 : 6 orang TW 3 : 6 orang TW 4 : 6 orang	TW 1 : 1.190.000,00 TW 2 : 1.700.000,00 TW 3 : 1.700.000,00 TW 4 : 850.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Lampasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 6 orang TW 2 : 6 orang TW 3 : 6 orang TW 4 : 6 orang	TW 1 : 5.610.000,00 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis padang karambia	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 77 orang TW 2 : 77 orang TW 3 : 77 orang TW 4 : 77 orang	TW 1 : 2.040.000,00 TW 2 : 2.550.000,00 TW 3 : - TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	TW 1 : 828 orang TW 2 : 828 orang TW 3 : 828 orang TW 4 : 828 orang	TW 1 : 38.064.575,00 TW 2 : 5.759.375,00 TW 3 : 16.224.375,00 TW 4 : 7.009.375,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 1.674.350,00 TW 2 : 6.000.000,00 TW 3 : 6.232.500,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat DKK	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 12.887.600,00 TW 2 : 129.866.980,00 TW 3 : 165.051.060,00 TW 4 : 96.384.280,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 1 dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 38.485.050,00 TW 2 : 29.310.000,00 TW 3 : 19.640.000,00 TW 4 : 13.860.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Payolasek	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 8.093.300,00 TW 2 : 68.888.750,00 TW 3 : 3.825.000,00 TW 4 : 2.550.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Ibut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 13.600.000,00 TW 2 : 47.202.750,00 TW 3 : 45.472.000,00 TW 4 : 13.600.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Air Tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 5.185.000,00 TW 2 : 36.665.500,00 TW 3 : 36.014.500,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Parit Rantang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 16.157.650,00 TW 2 : 24.000.000,00 TW 3 : 3.965.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 9.860.000,00 TW 2 : 6.120.000,00 TW 3 : 36.080.000,00 TW 4 : 16.069.500,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 10 dokumen TW 2 : 10 dokumen TW 3 : 10 dokumen TW 4 : 10 dokumen	TW 1 : 680.000,00 TW 2 : 15.500.500,00 TW 3 : 21.561.000,00 TW 4 : 2.834.600,00	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 6.800.000,00 TW 2 : 73.418.050,00 TW 3 : 8.415.000,00 TW 4 : 5.100.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga dkk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 12.205.200,00 TW 2 : 4.600.000,00 TW 3 : 16.960.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 34.106.900,00 TW 2 : 540.855.250,00 TW 3 : 11.495.000,00 TW 4 : 4.850.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : - 2 : 8.330.000,00 TW 3 : 850.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Payolansck	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.700.000,00 TW 2 : 6.290.000,00 TW 3 : 510.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Ibh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.550.000,00 TW 2 : 2.550.000,00 TW 3 : 2.550.000,00 TW 4 : 2.550.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Air Tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.890.000,00 TW 2 : 2.890.000,00 TW 3 : 2.550.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Parit rantang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.000.000,00 TW 2 : 2.000.000,00 TW 3 : 3.140.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 3.740.000,00 TW 2 : 2.380.000,00 TW 3 : - TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 3.825.000,00 TW 2 : 3.060.000,00 TW 3 : 2.975.000,00 TW 4 : 2.380.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.020.000,00 TW 2 : 1.020.000,00 TW 3 : 1.020.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 86.931.600,00 TW 2 : 51.550.834,00 TW 3 : 127.205.934,00 TW 4 : 43.363.332,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 3.729.200,00 TW 2 : 5.025.000,00 TW 3 : 3.120.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 33.415.350,00 TW 2 : 29.756.250,00 TW 3 : 27.540.000,00 TW 4 : 28.590.000,00	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 3.825.000,00 TW 2 : 6.885.000,00 TW 3 : 7.140.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Payolansck	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.778.800,00 TW 2 : 765.000,00 TW 3 : 5.865.000,00 TW 4 : 5.100.000,00	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Ibh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 3.209.250,00 TW 2 : 2.741.250,00 TW 3 : 2.741.250,00 TW 4 : 2.741.250,00	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Air tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 5.234.050,00 TW 2 : 5.100.000,00 □ TW 3 : 5.100.000,00 TW 4 : 2.380.000,00	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Parit Rintang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 3.978.200,00 TW 2 : 5.100.000,00 □ TW 3 : 5.100.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 : 2.167.200,00 TW 2 : 2.131.200,00 □ TW 3 : 7.231.200,00 TW 4 : 5.810.400,00	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 765.000,00 TW 2 : 7.457.800,00 □ TW 3 : 1.530.000,00 TW 4 : 765.000,00	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 4.489.600,00 TW 2 : 3.570.000,00 □ TW 3 : 2.125.000,00 TW 4 : 765.000,00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	TW 1 : 85 orang TW 2 : 85 orang TW 3 : 85 orang TW 4 : 85 orang	TW 1 : 2 : 6.190.000,00 □ TW 3 : 13.800.000,00 TW 4 : 2.410.000,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) ibu	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 87 orang TW 2 : 87 orang TW 3 : 87 orang TW 4 : 87 orang	TW 1 : 1.105.000,00 TW 2 : 6.740.000,00 □ TW 3 : - TW 4 : -	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) parit rantang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 27 orang TW 2 : 27 orang TW 3 : 27 orang TW 4 : 27 orang	TW 1 : 6.454.000,00 TW 2 : □ TW 3 : 6.445.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) payolasek	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 7 orang TW 2 : 7 orang TW 3 : 7 orang TW 4 : 7 orang	TW 1 : 6.745.000,00 TW 2 : 9.097.500,00 □ TW 3 : 9.097.500,00 TW 4 : 6.065.000,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) tiakar	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 1006 orang TW 2 : 1006 orang TW 3 : 1006 orang TW 4 : 1006 orang	TW 1 : 14.697.600,00 TW 2 : □ TW 3 : 12.988.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) air tabit	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 12 orang TW 2 : 12 orang TW 3 : 12 orang TW 4 : 12 orang	TW 1 : 8.386.250,00 TW 2 : 2.550.000,00 □ TW 3 : 8.386.250,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) tarok	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 756 orang TW 2 : 756 orang TW 3 : 756 orang TW 4 : 756 orang	TW 1 : 7.125.000,00 TW 2 : 7.125.000,00 □ TW 3 : 14.250.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) lampasi	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 87 orang TW 2 : 87 orang TW 3 : 87 orang TW 4 : 87 orang	TW 1 : 1.776.000,00 TW 2 : 1.700.000,00 □ TW 3 : 16.584.000,00 TW 4 : -	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) padang karambia	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 6 orang TW 2 : 6 orang TW 3 : 6 orang TW 4 : 6 orang	TW 1 : 850.000,00 TW 2 : 4.947.000,00 □ TW 3 : 850.000,00 TW 4 : -	
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 15.671.500,00 TW 2 : 394.411.500,00 □ TW 3 : 12.130.000,00 TW 4 : 4.270.000,00	
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 15.555.000,00 TW 2 : 13.855.000,00 □ TW 3 : 20.060.000,00 TW 4 : 850.000,00	
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Payolasek	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 12.750.000,00 TW 2 : 12.750.000,00 □ TW 3 : 12.665.000,00 TW 4 : 5.780.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Ibut	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 9.222.500,00 TW 2 : 9.222.500,00 □ TW 3 : 9.222.500,00 TW 4 : 9.222.500,00	
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Air Tabir	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 8.500.000,00 TW 2 : 8.500.000,00 □ TW 3 : 8.500.000,00 TW 4 : 8.500.000,00	
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Parit Rintang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 9 dokumen TW 2 : 9 dokumen TW 3 : 9 dokumen TW 4 : 9 dokumen	TW 1 : 5.010.800,00 TW 2 : 10.000.000,00 □ TW 3 : 10.000.000,00 TW 4 : 7.385.000,00	
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 15.000.000,00 TW 2 : 15.000.000,00 □ TW 3 : 15.000.000,00 TW 4 : 2.770.000,00	
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 10 dokumen TW 2 : 10 dokumen TW 3 : 10 dokumen TW 4 : 10 dokumen	TW 1 : 11.305.000,00 TW 2 : 9.860.000,00 □ TW 3 : 11.730.000,00 TW 4 : 8.245.000,00	
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 6.460.000,00 TW 2 : 2.550.000,00 □ TW 3 : 5.950.000,00 TW 4 : 170.000,00	
					Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 15.555.000,00 TW 2 : 13.855.000,00 □ TW 3 : 20.060.000,00 TW 4 : 850.000,00	
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang Didistribusikan (Paket)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	TW 1 : 3 paket TW 2 : 3 paket TW 3 : 3 paket TW 4 : 3 paket	TW 1 : 67.131.000,00 TW 2 : □ TW 3 : 66.785.000,00 TW 4 : □	
					Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 10.236.381.950,00 TW 2 : 9.952.840.800,00 TW 3 : 2.600.000,00 TW 4 : 2.600.000,00	
					Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 10.311.900,00 TW 2 : 12.610.400,00 □ TW 3 : 17.087.500,00 TW 4 : 4.025.000,00	
					Operasional pelayanan Puskesmas Tiakar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 30.415.000,00 TW 2 : 39.247.500,00 □ TW 3 : 39.247.500,00 TW 4 : 17.665.000,00	
					Operasional pelayanan Puskesmas Payolansak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 1 dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 29.650.000,00 TW 2 : 37.300.000,00 □ TW 3 : 37.300.000,00 TW 4 : 29.650.000,00	
					Operasional pelayanan Puskesmas Ibut	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 34.134.750,00 TW 2 : 34.339.550,00 □ TW 3 : 34.134.750,00 TW 4 : 34.134.750,00	
					Operasional pelayanan Puskesmas Air Tabir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 41.420.000,00 TW 2 : 41.420.000,00 □ TW 3 : 41.420.000,00 TW 4 : 3.515.500,00	
					Operasional pelayanan Puskesmas Tarok	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 9 dokumen TW 2 : 9 dokumen TW 3 : 9 dokumen TW 4 : 9 dokumen	TW 1 : 41.880.000,00 TW 2 : 29.640.000,00 □ TW 3 : 41.880.000,00 TW 4 : 17.800.000,00	
					Operasional pelayanan Puskesmas Parit rantang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 13 dokumen TW 2 : 13 dokumen TW 3 : 13 dokumen TW 4 : 13 dokumen	TW 1 : 47.117.600,00 TW 2 : 47.070.000,00 □ TW 3 : 48.540.000,00 TW 4 : 18.000.000,00	
					Operasional pelayanan Puskesmas Lampasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 16 dokumen TW 2 : 16 dokumen TW 3 : 16 dokumen TW 4 : 16 dokumen	TW 1 : 101.090.850,00 TW 2 : 13.260.000,00 □ TW 3 : 13.260.000,00 TW 4 : 13.260.000,00	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Operasional pelayanan Puskesmas Padang Karambia	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 40.485.813,00 TW 2 : 50.685.813,00 TW 3 : 50.685.813,00 TW 4 : 40.485.811,00	
					Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 975.000,00 TW 2 : 30.000.000,00 TW 3 : 38.200.000,00 TW 4 : -	
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	TW 1 : 1 laporan TW 2 : 2 laporan TW 3 : 2 laporan TW 4 : - laporan	TW 1 : 1.275.000,00 TW 2 : 2.080.000,00 TW 3 : 2.380.000,00 TW 4 : -	
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	TW 1 : unit TW 2 : 1 unit TW 3 : unit TW 4 : unit	TW 1 : 84.381.050,00 TW 2 : 133.161.000,00 TW 3 : 78.609.700,00 TW 4 : 33.078.000,00	
					Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	TW 1 : tatanan TW 2 : 1 tatanan TW 3 : tatanan TW 4 : tatanan	TW 1 : - TW 2 : 10.297.300,00 TW 3 : 1.530.000,00 TW 4 : 31.615.000,00	
					Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 19.135.233,00 TW 2 : 16.549.089,00 TW 3 : 26.667.839,00 TW 4 : 24.756.589,00	
					Pengelolaan Layanan Imunisasi ibu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 6.375.000,00 TW 2 : 6.375.000,00 TW 3 : 6.375.000,00 TW 4 : 6.375.000,00	
					Pengelolaan Layanan Imunisasi parit rantang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	TW 1 : 7 dokumen TW 2 : 7 dokumen TW 3 : 7 dokumen TW 4 : 7 dokumen	TW 1 : 12.500.000,00 TW 2 : 12.500.000,00 TW 3 : 12.500.000,00 TW 4 : 12.480.000,00	
					Pengelolaan Layanan Imunisasi payolasek	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	TW 1 : 575 dokumen TW 2 : 575 dokumen TW 3 : 575 dokumen TW 4 : 575 dokumen	TW 1 : 9.265.000,00 TW 2 : 15.215.000,00 TW 3 : 17.680.000,00 TW 4 : 11.475.000,00	
					Pengelolaan Layanan Imunisasi tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	TW 1 : 26 dokumen TW 2 : 26 dokumen TW 3 : 26 dokumen TW 4 : 26dokumen	TW 1 : 13.175.000,00 TW 2 : 17.170.000,00 TW 3 : 20.400.000,00 TW 4 : 19.975.000,00	
					Pengelolaan Layanan Imunisasi air tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 15.066.250,00 TW 2 : 15.066.250,00 TW 3 : 15.066.250,00 TW 4 : 15.066.250,00	
					Pengelolaan Layanan Imunisasi tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	TW 1 : 4 dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 : 25.500.000,00 TW 2 : 25.500.000,00 TW 3 : 25.500.000,00 TW 4 : 8.500.000,00	
					Pengelolaan Layanan Imunisasi lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	TW 1 : 4 dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 : 18.190.000,00 TW 2 : 14.280.000,00 TW 3 : 24.820.000,00 TW 4 : 17.850.000,00	
					Pengelolaan Layanan Imunisasi padang karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	TW 1 : 301 dokumen TW 2 : 301 dokumen TW 3 : 301 dokumen TW 4 : 301 dokumen	TW 1 : 11.475.000,00 TW 2 : 11.475.000,00 TW 3 : 16.575.000,00 TW 4 : 16.150.000,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 5.390.200,00 TW 2 : 26.300.000,00 TW 3 : - TW 4 : -	
					Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 5.780.000,00 TW 2 : 116.240.000,00 TW 3 : 16.045.000,00 TW 4 : 18.657.400,00	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Padang Karambia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 5 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : - TW 2 : 510.000,00 □ TW 3 : 510.000,00 TW 4 : 255.000,00
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Ibh	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 5 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 34.134.750,00 TW 2 : 34.339.550,00 □ TW 3 : 34.134.750,00 TW 4 : 34.134.750,00
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Parit Rantang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : □ TW 3 : 2 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 510.000,00 TW 2 : □ TW 3 : □ TW 4 : □
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Air Tabit	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 255.000,00 TW 2 : 255.000,00 □ TW 3 : 255.000,00 TW 4 : 255.000,00
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Lampasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	TW 1 : 1 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.275.000,00 TW 2 : -□ TW 3 : - TW 4 : -
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Tarok	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	TW 1 : 1 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 510.000,00 TW 2 : 1.020.000,00 □ TW 3 : 170.000,00 TW 4 : -
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Tiakar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 1.275.000,00 TW 2 : -□ TW 3 : - TW 4 : -
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Payolansék	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.700.000,00 TW 2 : □ TW 3 : □ TW 4 : □
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 5.390.200,00 TW 2 : 26.300.000,00 □ TW 3 : - TW 4 : -
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100%	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (dik)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.610.000,00 TW 2 : 1.610.000,00 TW 3 : 42.081.800,00 TW 4 : 1.610.000,00
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perizinan Rumah Sakit kelas C,D dan Fasilitas pelayanan kesehatan yang diterbitkan	12 Dokumen	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinan (Unit)	TW 1 : 2 unit TW 2 : 2 unit TW 3 : unit TW 4 : unit	TW 1 : 3.545.200,00 TW 2 : 12.885.000,00 TW 3 : □ TW 4 : -
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 2.266.650,00 TW 2 : 95.103.000,00 □ TW 3 : □ TW 4 : -
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			35%
						Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten / kota	Persentase Puskesmas dengan SDMk sesuai standar, Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	TW 1 : 2 orang TW 2 : 2 orang TW 3 : 2 orang TW 4 : 2 orang	TW 1 : □ TW 2 : 7.419.800,00 □ TW 3 : 12.580.000,00 □ TW 4 :
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.720.000,00 □ TW 2 : 333.070.000,00 □ TW 3 : 217.304.250,00 □ TW 4 : 26.849.200,00
						Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah SDM kesehatan yang meningkat kompetensinya	25 orang	.
						Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	TW 1 : orang TW 2 : 25 orang TW 3 : orang TW 4 : orang	TW 1 : □ TW 2 : 311.364.000,00 TW 3 : 132.477.000,00 □ TW 4 :
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE CAKUPAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		94%
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar, Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	100%	.
						Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga DKK	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 27.000.000,00 TW 2 : 70.750.000,00 TW 3 : 184.667.800,00 TW 4 :-
						Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara / Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	.
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 7.312.500,00 TW 2 : 16.330.500,00 TW 3 : 24.520.000,00 □ TW 4 :
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN YANG DIBERDAYAKAN		100%
						Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakat yang tersedia	12 Dokumen	.
						Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 468.038.800,00 □ TW 2 : 275.009.200,00 □ TW 3 : 265.710.000,00 TW 4 : 265.710.000,00
						Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat ibu	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 4.866.500,00 TW 2 : 4.866.500,00 □ TW 3 : - TW 4 :-
						Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat parit rantang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 10.715.000,00 TW 2 : - □ TW 3 : 10.378.750,00 TW 4 :-
						Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat payolasek	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.530.000,00 □ TW 2 : - □ TW 3 : 8.829.000,00 TW 4 :

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat tiakar	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.530.000,00 TW 2 : 17.735.950,00 □ TW 3 : 2.729.500,00 TW 4 :-	
					Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat air tabit	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 11.862.200,00 TW 2 : -□ TW 3 : 11.803.750,00 TW 4 :-	
					Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat tarok	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 8.000.000,00 TW 2 : 9.486.500,00 □ TW 3 : 7.000.000,00 TW 4 : 2.890.000,00	
					Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat lampasi	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 3.230.000,00 TW 2 : 9.062.400,00 □ TW 3 : 8.525.000,00 TW 4 : 1.530.000,00	
					Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat padang karambia	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.068.000,00 TW 2 : 10.815.000,00 □ TW 3 : 9.182.500,00 TW 4 :-	
					Pelaksanaan sebat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Promkes yang tersedia	12 Dokumen		
					Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 13.136.900,00 TW 2 : 13.689.000,00 TW 3 : 15.622.000,00 TW 4 : 14.814.500,00	
					Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	12 Dokumen		
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) DKK	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 8.967.100,00 TW 2 : 32.935.000,00 TW 3 : 35.772.500,00 TW 4 : 8.500.000,00	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 3.740.000,00 TW 2 : 23.189.250,00 TW 3 : 3.740.000,00 TW 4 :-	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Payolasek	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 3.975.000,00 □ TW 2 : 16.500.000,00 □ TW 3 : 16.500.000,00 □ TW 4 : 3.975.000,00	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Ibh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 38.640.000,00 TW 2 : □ TW 3 : □ TW 4 :	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Air Tabit	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 4.871.250,00 □ TW 2 : 23.269.500,00 TW 3 : 4.661.000,00 TW 4 :-	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Parit Rintang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 18.049.000,00 □ TW 2 : 6.000.000,00 TW 3 : 2.500.000,00 TW 4 : 1.260.000,00	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 4.718.000,00 TW 2 : 4.000.000,00 TW 3 : 2.225.000,00 □ TW 4 : 1.990.000,00	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 3.712.500,00 TW 2 : 28.301.250,00 □ TW 3 : 3.712.500,00 TW 4 : 6.758.250,00	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.550.000,00 TW 2 : 19.198.750,00 TW 3 : - TW 4 : 2.550.000,00	
5	MENINGKATKAN AKUTANTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	NILAI EVALUASI AKIP OLEH INSPEKTORAT	87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM (INDEKS)		91%		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	TW 1:6 dokumen TW 2: 6 dokumen TW 3: 6 dokumen TW 4 :5 dokumen	TW 1 : 17.984.750,00 TW 2 : 18.666.975,00 TW 3 : 24.556.500,00 TW 4 : -	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	TW 1 : 20 laporan TW 2 : 20 laporan TW 3 : 20 laporan TW 4 : 10 laporan	TW 1 : 8.398.800,00 TW 2 : 14.844.950,00 TW 3 : 16.150.500,00 TW 4 : -	
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 2.415.000,00 TW 2 : 2.000.000,00 TW 3 : 2.000.000,00 TW 4 : -	
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	TW 1 : 3 data TW 2 : 3 data TW 3 : 3 data TW 4 : 3 data	TW 1 : 1.207.500,00 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	100%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	TW 1 : 786 orang TW 2 : 786 orang TW 3 : 786 orang TW 4 : 786 orang	TW 1 : 26.961.594.264,00 TW 2 : 26.046.047.859,00 TW 3 : 17.020.929.689,00 TW 4 : 13.155.415.165,00	
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 161.040.000,00 TW 2 : 161.040.000,00 TW 3 : 161.040.000,00 TW 4 : 161.040.000,00	
					Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 6.551.500,00 TW 2 : 6.534.000,00 TW 3 : 6.514.000,00 TW 4 : -	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	100%		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	TW 1 : paket TW 2 : 1 paket TW 3 : paket TW 4 : paket	TW 1 : 2.425.500,00 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	TW 1 : paket TW 2 : 1 paket TW 3 : paket TW 4 : paket	TW 1 : 22.025.460,00 TW 2 : 420.000,00 TW 3 : 420.000,00 TW 4 : 360.000,00	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	TW 1 : paket TW 2 : 1 paket TW 3 : paket TW 4 : paket	TW 1 : 16.859.500,00 TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : -	
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	TW 1 : 3 laporan TW 2 : 3 laporan TW 3 : 3 laporan TW 4 : 3 laporan	TW 1 : 1.725.000,00 TW 2 : 1.300.000,00 TW 3 : 1.000.000,00 TW 4 : -	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	TW 1 : 125 laporan TW 2 : 125 laporan TW 3 : 125 laporan TW 4 : 125 laporan	TW 1 : 40.016.000,00 TW 2 : 40.000.000,00 TW 3 : 32.318.000,00 TW 4 : -	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 1.207.500,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	
					Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	TW 1 : laporan TW 2 : 1 laporan TW 3 : laporan TW 4 : laporan	TW 1 : 1.000.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	TW 1 : 9 laporan TW 2 : 9 laporan TW 3 : 9 laporan TW 4 : 9 laporan	TW 1 : 98.101.200,00 TW 2 : 93.000.000,00 TW 3 : 83.030.560,00 TW 4 : 75.868.021,00	
					Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	TW 1 : 3 laporan TW 2 : 3 laporan TW 3 : 3 laporan TW 4 : 3 laporan	TW 1 : 352.478.000,00 TW 2 : 352.441.800,00 TW 3 : 352.457.300,00 TW 4 : 306.252.060,00	
					Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	TW 1 : unit TW 2 : unit TW 3 : 1 unit TW 4 : unit	TW 1 : 42.950.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan. Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	TW 1 : 45 unit TW 2 : 45 unit TW 3 : 45 unit TW 4 : 45 unit	TW 1 : 91.650.000,00 TW 2 : 85.700.000,00 TW 3 : 81.700.000,00 TW 4 : 84.000.000,00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	TW 1 : 9 unit TW 2 : 9 unit TW 3 : 9 unit TW 4 : 8 unit	TW 1 : 6.220.000,00 TW 2 : 4.220.000,00 TW 3 : 4.230.000,00 TW 4 :-	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	TW 1 : unit TW 2 : 1 unit TW 3 : unit TW 4 : unit	TW 1 : 10.000.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	
					Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	9 unit kerja		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 25.780.161.007,00 TW 2 : 21.080.161.007,00 TW 3 : 19.236.042.341,00 TW 4 : 18.036.042.361,00	
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ibul	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 356.953.188,00 TW 2 : 365.739.238,00 TW 3 : 365.739.238,00 TW 4 : 356.953.184,00	
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas parit Rantang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 460.256.650,00 TW 2 : 268.680.000,00 TW 3 : 268.680.000,00 TW 4 : 60.777.315,00	
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Payolansak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 322.473.600,00 TW 2 : 283.930.000,00 TW 3 : 283.930.000,00 TW 4 : 163.593.290,00	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tiakar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 258.352.650,00 TW 2 : 262.570.950,00 TW 3 : 264.380.400,00 TW 4 : 248.356.000,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Air Tabit	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 378.651.600,00 TW 2 : 378.651.600,00 TW 3 : 378.651.800,00 TW 4 : 18.650.000,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tarok	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 500.650.000,00 TW 2 : 403.970.000,00 TW 3 : 567.077.000,00 TW 4 : 19.330.000,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lampasi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 473.650.000,00 TW 2 : 325.370.000,00 TW 3 : 318.650.000,00 TW 4 : 262.330.000,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padang Karambia	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 874.472.000,00 TW 2 : 18.050.000,00 TW 3 : 18.050.000,00 TW 4 : 18.050.000,00

Payakumbuh, Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kota



dr. YANTI, M.P.H
NIP. 196910182000032003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : dr.Yanti,M.P.H
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Zulmaeta
Jabatan : Walikota Payakumbuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, 17 Oktober 2025

PIHAK KEDUA


Zulmaeta

PIHAK PERTAMA


dr.Yanti,M.P.H
NIP. 19691018 20003 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indek keluarga sehat	0,5 Indeks
		Prevalansi Stunting Pada Balita	17,80 %
		Inovasi Layanan Kesehatan	3 Inovasi
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	85

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	54.542.700.883	APBD /DAK
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	511.696.900	APBD /DAK
3	Program Sediaan farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	514,182,600	APBD / DAK
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.275.367.700	APBD /DAK
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	181.744.376.980	APBD
	Jumlah	238.588.325.063	

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Zulmaeta

Payakumbuh, 17 Oktober 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr.Yanti ,M.P.H
NIP. 19691018 2000003 2 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : **DESI AVIANTI, SKM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **Hj. YUNIRI YUNIRMAN,SE.M.Si,Akt**
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua

Hj. YUNIRI YUNIRMAN,SE.M.Si,Akt

NIP. 19740310 199803 2 006

Pihak Pertama

DESI AVIANTI, SKM

NIP. 19780423 200604 2 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	Jumlah dokumen kinerja OPD yang disajikan tepat waktu dan sasaran	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100
		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disajikan akurat dan tepat waktu	%	100
		Persentase ASN yang naik pangkat dan naik gaji berkala tepat waktu	%	100
2	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran tepat waktu	%	100
		Persentase kehadiran dan disiplin pegawai	%	100
		Persentase file kepegawaian yang lengkap	%	100
3	Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor	%	90
		Persentase pemeliharaan gedung kantor dan Sarana dan prasana lainnya	%	90
		Persentase Tingkat kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas	%	100
		Persentase tatalaksana dan penataan kantor yang aman dan nyaman didalam dan diluar gedung	%	100

Payakumbuh, Oktober 2025

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH



Hj. YUNIRI YUNIRMAN, SE.M.Si, Akt
NIP. 19740310 199803 2 006

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN,
KEPEGAWAIAN DAN UMUM



DESI AVIANTI, SKM
NIP. 19780423 200604 2 009



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : ELFIRA NELDI, SKM
Jabatan : Kepala Subbag Program, Informasi dan Humas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Yuniri Yunirman, SE.M.Si,Akt
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua

Yuniri Yunirman, SE.M.Si,Akt
NIP. 19740310 199803 2 006

Pihak Pertama

ELFIRA NELDI, SKM
NIP. 19830302 200604 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS
DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Penyediaan data dan informasi yang akurat	Jumlah data dan informasi yang tersedia (SPM, Profil, IKM, Komdat, Payakumbuh dalam angka, Dalbang, TKDN, Sirup, Rekomendasi, Izin penelitian, Aplot kegiatan media)	10 Dokumen
2	Penyusunan dokumen perencanaan dan kinerja tepat waktu dan tepat sasaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Renstra, Renja, DPA (RKA APBD dan DAK) dll)	5 Dokumen
		Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu (PMPRB, RTP, SAKIP, Profil, SPM, IKM)	6 Dokumen
3	Terlaksananya evaluasi berkala terhadap dokumen kinerja	Jumlah kegiatan evaluasi terhadap dokumen perencanaan (Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan)	21 Laporan
		Persentase rencana tindak lanjut yang dilaksanakan	100 %

NO.	Sub Kegiatan	RP	ANGGARAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RP	75.008.650
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RP	65.039.300
	TOTAL	RP	140.047.950

**SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH**


Yuniri Yunirman, SE.M.Si, Akt
NIP. 19740310 199803 2 006

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama


ELFIRA NELDI, SKM
NIP. 19830302 200604 2 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT (KESMAS & P3)
DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : VIVI LESWARY, SKM. MKM
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (Kesmas & P3) Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Yuniri Yunirman, SE
Jabatan : PLT. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua

Yuniri Yunirman, SE.M.Si.Akt
NIP. 19740310 199803 2006

Pihak Pertama

VIVI LESWARY, SKM. MKM
NIP. 19740822 199403 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT (KESMAS & P3)
DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100 %
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %
		Persentase pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	100 %
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100 %
		Persentase pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan dasar	100 %
2	Meningkatnya status Gizi Masyarakat	Persentase status gizi masyarakat sesuai standar	100 %
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia	Persentase pelayanan kesehatan Usia lanjut	100 %
4	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kasus penyakit menular	Persentase penanganan malaria, Diare dan DBD	100 %
		Persentase penanganan kasus HIV	100 %
		Persentase penanganan kasus TB	100 %
		Persentase penanganan kasus Kusta tanpa cacat	100 %
		Persentase surveilans kesehatan penyakit menular	100 %
5	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase penderita Hipertensi yang tertangani sesuai standar	100 %
		Persentase penderita DM yang terangani sesuai standar	100 %
		Persentase penderita jiwa yang tertangani sesuai standar	100 %
		Persentase pelaksanaan skrining deteksi dini faktor resiko PTM	100 %
6	Meningkatnya pencegahan penyakit PD3I	Persentase Imunisasi dasar lengkap (IDL)	70 %
		Persentase imunisasi Baduta Lengkap (IBL)	40 %
		Persentase Td2+	80 %

		Persentase BIAS	40 %
7	Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	Persentase Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)	100 %
		Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minum sesuai standar	80 %
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar	65 %
		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	85 %
		Persentase fasyankes menyelenggarakan kesehatan lingkungan (Pengelolaan Limbah Fasyankes)	90 %
8	Meningkatkan pelayanan kesehatan kerja	Persentase puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	90 %
9	Meningkatkan pelayanan kesehatan olah raga	Persentase Puskesmas melaksanakan aktifitas fisik/kesehatan olahraga	90 %
10	Meningkatkan kuantitas pelaksanaan inovasi	Pelaksanaan inovasi	1 kegiatan inovasi

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 277.375.800	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 193.111.000	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp 52.024.300	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Rp 41.996.400	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp 89.684.550	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 521.367.900	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak	Rp 46.450.000	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 21.279.300	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 21.139.650	

10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp	343.967.350
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Rp	102.439.900
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp	13.150.000
13	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp	41.961.100
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Rp	24.333.200
15	Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp	266.667.500
16	Pengelolaan Pelayanan Usia Produktif	Rp	30.813.700
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp	267.015.000
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp	71.791.000
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp	89.319.700
20	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp	124.138.850
	Total	Rp	2.640.026.200

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Kedua

Yuniri Yunirman, SE.M.Si, Akt
NIP. 19740310 199803 2006

Pihak Pertama

VIVI LESWARY, SKM. MKM
NIP. 19740822 199403 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Ns. Juli Juwita, S.Kep
Jabatan :Plt. Kepala Bidang Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan
(PPSDK) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : Yuniri Yunirman.SE.M.Si.Akt
Jabatan : PLT.Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Yuniri Yunirman.SE.M.Si,Akt
NIP. 19740310 199803 2 006

Payakumbuh, Oktober 2025

Pihak Pertama

Ns. Juli Juwita, S.Kep
NIP. 19840708 200901 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BIDANG PELAYANAN PROMOSI DAN SUMBER DAYA KESEHATAN**

No	Sasaran/ Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat	1. Persentase cakupan peran aktif masyarakat untuk hidup sehat 2. Persentase PHBS	1. 80 % 2. 60 %
2	Meningkatnya upaya promotif & preventif kesehatan	1. Persentase cakupan pelayanan promosi kesehatan	1. 60 %
3	Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan	1. Persentase peningkatan kuantitas & kualitas pelayanan kesehatan 2. Persentase Sappras Rumah Sakit / Puskesmas sesuai standar	1. 80% 2. 80%
4	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Tradisional sesuai standar	1. Persentase peningkatan Yankestrad sesuai standar	1. 80 %
5	Meningkatnya mutu obat dan perbelkes	1. Persentase ketersediaan obat & perbelkes untuk 24 bulan	1. 80 %
6	Meningkatnya pengawasan & keamanan pangan	1. Persentase IRTP yang telah memiliki sertifikat pelatihan 2. Persentase IRTP yang direkomendasikan untuk izin usaha	1. 80% 2. 80%
7	Meningkatnya mutu dan kompetensi SDM	Persentase SDM yang meningkat mutu dan kompetensinya	80 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Sub keg Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Rp 598.787.300,-	
2	Sub keg Peningkatan Upaya promosi Kesehatan,advokasi,kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Rp 1.088.028.200,-	
3	Sub keg penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat	Rp 69.748.800,-	
4	Sub keg Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Rp 76.177.150,-	
5	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp 5.001.000,-	
6	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 506.695.900,-	
7	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Rp 435.942.900,-	
8	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 742.999.900,-	
9	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp 178.102.060,-	
10	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 906.401.064,-	
11	Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	Rp 13.248.440.700,-	
12	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 115.950.000,-	
13	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 72.211.700,-	
14	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 295.895.300,-	

15	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp	17.820.055.550,-
16	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp	232.862.000,-
17	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Rp	23.738.000,-
18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp	18.163.450,-
19	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp	11.847.500,-
20	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp	16.424.100,-
21	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.206.000,-
22	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp	138.791.300,-
23	Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp	14.849.850,-
24	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp	6.093.500,-
25	Sub keg Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotik toko obat toko alat Kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional	Rp	6.028.000

Payakumbuh, Oktober 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN



Yuniri Yunirman, SE.M.Si, Akt
NIP. 19740310 199803 2 006

Pit. KEPALA BIDANG PPSDK



Ns. Juli Juwita, S.Kep
NIP. 19840708 200901 2 003



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KESEHATAN

*Jalan Gelatik-Kelurahan Tigo Koto Diateh
Kec. Payakumbuh Utara
Telp/Fax □ No. 082169456587 Payakumbuh 26218*

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 800.1.5/54/dkk-2025

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- A. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, indikator, target dan pendanaan;
 - B. bahwa indikator sasaran strategis Renstra merupakan indikator utama yang menjadi indikator evaluasi pencapaian kinerja program prioritas Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang untuk perlu disesuaikan;
 - C. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh;
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025-2029);
14. Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor. 060.2/177/Wk- Pyk/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :Keputusan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Dasar pemilihan dan penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tersebut diatas adalah :
1. Merupakan irisan antara Indikator Kinerja Kunci dan Standar Pelayanan Minimal (Standar Pelayanan Minimal) dan Peraturan lainnya yang memuat indikator-indikator teknis bidang Kesehatan dalam tata sistem pelaporan daerah;
 2. Menjadi indikator evaluasi pencapaian target kinerja untuk program-program prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
 3. Memberikan kontribusi pencapaian kinerja di bidang kesehatan untuk Pemerintah Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 4. Mempertimbangkan kemampuan daerah Kota Payakumbuh dengan mengadopsi lokal spesifik wilayah Payakumbuh yang berlaku;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator evaluasi pencapaian kinerja program prioritas Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 September 2025
Pdt. Kepala Dinas Kesehatan



YUNIRI YUNIRMAN

Tembusan : disampaikan
kepada Yth,

1. Bapak Walikota Payakumbuh (Sebagai Laporan) di Payakumbuh
2. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh di Payakumbuh
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 800.1.5/54/dkk-2025

TANGGAL : 22 September 2025

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULA /CARA PENDUKUNG	SUMBER DATA	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal	Angka Usia harapan Hidup	Angka		Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	BPS	PPN
2		Prevalensi Stunting	%	Stunting adalah kondisi anak memiliki berat badan dibawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan gizi kronis pasca periode 1000 hari pertama kehidupan	Jumlah anak balita stunting dibawah 5 tahun dibagi jumlah anak balita dikali 100 persen JAB(5) SP Stunting PAB(5) : x 100% SP Stunting JAB(5) PAB(5) SP Stunting = Prevalensi Anak Balita yang menderita Sangat Pendek (stunting) JAB(5) SP Stunting = Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu	SSGI	

					JAB(5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama		
3	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Tahun	<p>Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni:</p> <p>*Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, *Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 â€“ 0,8 dan *Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5.</p>	<p>Perhitungan 12 indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengikuti KB 2. Ibu bersalin di Fasyankes 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan 5. Memantau pertumbuhan balita setiap bulan 6. Penderita TB paru berobat sesuai standar 7. Penderita hipertensi berobat secara teratur 8. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan 9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok 10. Keluarga mempunyai akses air bersih 	Permenkes No. 39 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PISPK	

					11. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat Sekeluarga menjadi anggota JKN		
4.	Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting	%	Stunting adalah kondisi anak memiliki berat badan dibawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan gizi kronis pasca periode 1000 hari pertama	Jumlah anak balita stunting dibawah 5 tahun dibagi jumlah anak balita dikali 100 persen JAB(5) SP Stunting PAB(5) : x 100% SP Stunting JAB(5) PAB(5) SP Stunting = Prevalensi Anak Balita yang menderita Sangat Pendek (stunting) JAB(5) SP Stunting = Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama	ePPGBM	
5.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada periode waktu tertentu	Target pemerintah Kota Payakumbuh untuk peningkatan capaian kinerja perangkat daerah	Inspektorat	

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahunan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	75.08	75.31	75.57	75.83	76.18	76.36
2	Prevalensi Stunting Berdasarkan SSGI	16,40	13,70	12,45	11,20	9,95	8,70
3	Indeks Keluarga Sehat	0.35	0.38	0.4	0.45	0.5	0.6
4	Prevalensi Stunting Berdasarkan ePPGBM	2.16	2.12	2.08	2.04	2	1.94
5	AKIP	83	85	87	88	89	90

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 September 2025
Pl. Kepala Dinas Kesehatan



YUNIRI YUNIRMAN

